
***PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP NIAT PENGUSAHA
UMKM MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK ETAP
(Studi Kasus di Kampung Nasem, Kuler, dan Onggaya)***

Samuel Waas, Dina Fitri Septarini
Fakultas Ekonomi, Universitas Musamus Merauke

ABSTRAK

Penggalakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis dalam menggerakkan potensi ekonomi masyarakat, dan menjadi tumpuan pendapatan sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terbukti kontribusi UMKM terhadap PDB nasional cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan yang pesat tidak berarti bahwa UMKM tidak memiliki hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Salah satu hambatan yang hampir dialami oleh setiap pengusaha UMKM adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Kebanyakan pengusaha UMKM tidak menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi padahal Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks SAK Umum. Tidak disajikannya laporan keuangan sesuai SAK ETAP diduga karena terbatasnya pengetahuan tentang akuntansi yang dimiliki para pengusaha UMKM. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman akuntansi terhadap niat pengusaha UMKM menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan memberikan kuesioner kepada 37 responden. Populasi dan sampel yang digunakan adalah pengusaha UMKM yang berdomisili di Kampung Nasem, Kuler, dan Onggaya. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah analisis regresi yang diolah dengan bantuan software SPSS 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap niat pengusaha UMKM untuk menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Hal ini ditunjukkan dengan t-hitung yang lebih kecil daripada t-tabel ($1,768 < 2,045$) pada tingkat signifikansi 5%.

Kata kunci: pemahaman akuntansi, niat menyajikan Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf pendapatan masyarakat adalah dengan menggalakkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terbukti hingga tahun 2011 kontribusi UMKM terhadap PDB nasional cenderung meningkat. Pada tahun 2009 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai sekitar 45% atau senilai Rp2.000 triliun (Rudiatoro dan Siregar, 2011). Pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 3.466,39 triliun atau 57,12 persen. Pada tahun 2011, peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional mencapai Rp. 4.303,57 triliun atau 57,94 persen. (www.depkop.go.id diunduh tanggal 31 Agustus 2013). Di Kabupaten Merauke, keberadaan UMKM dari tahun ke tahun juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah UMKM yang terdaftar sebanyak 342 unit dan meningkat menjadi 365 unit pada tahun

2009. Pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi 457 unit dan 527 unit pada tahun 2011 (Dinas Perdagangan, Koperasi, & UMKM Kabupaten Merauke).

Perkembangan yang pesat tidak berarti bahwa UMKM tidak memiliki hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Salah satu hambatan yang hampir dialami oleh setiap pengusaha UMKM adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Padahal sebagai suatu kegiatan usaha, dianjurkan pengusaha UMKM menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi agar dapat menilai kinerja usaha yang dijalankan. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti untuk proses pengajuan kredit bank maupun perhitungan pajak penghasilan. Namun, pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi masih merupakan hal yang sulit bagi pengusaha UMKM. Kebanyakan dari pengusaha UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang/utang yang muncul. Pembukuan tersebut tidak mengikuti standar akuntansi yang ada (Jati dkk, 2004). Mempekerjakan seseorang secara khusus untuk melakukan pembukuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan masih menjadi hal yang kurang realistis bagi kebanyakan pengusaha UMKM, sebab akan menambah pengeluaran untuk membayar gaji dari tenaga akuntansi tersebut. Hasil penelitian Said (2009) menunjukkan bahwa tidak disajikannya laporan keuangan sesuai standar akuntansi karena adanya keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukan hal yang penting bagi UMKM.

Murniati (2002) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil di Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 283 pengusaha kecil dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemilik/manajer (masa memimpin, pendidikan formal manajer/pemilik, dan pelatihan akuntansi yang diikuti manajer/pemilik) serta karakteristik perusahaan kecil dan menengah (umur perusahaan, sektor industri, dan skala usaha) secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut di atas, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif per 1 Januari 2011. SAK ETAP merupakan salah satu Standar Akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Secara umum SAK

ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks SAK Umum. Namun, masih kurangnya pemahaman akuntansi menyebabkan kurangnya pemahaman yang baik atas SAK ETAP, sehingga implementasi SAK ETAP menjadi tidak efektif dan tidak mampu mendorong pengusaha UMKM untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap niat pengusaha UMKM menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sementara usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Secara umum dalam penjelasan atas Undang Undang no. 20 Tahun 2008 dinyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Menurut SAK ETAP Laporan keuangan entitas meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

1. Neraca

Informasi yang disajikan dalam neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak

berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto. Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Bab ini mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab ini mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Pemahaman Akuntansi

Ernawati dan Wijaya (2011) mendefinisikan pemahaman akuntansi sebagai pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi keuangan yang sesuai dengan standar

akuntansi. Dalam penelitian ini pemahaman akuntansi didefinisikan sebagai pemahaman pengusaha UMKM tentang definisi, tujuan, dan proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Pada dasarnya laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Adapun tujuan laporan keuangan menurut SAK ETAP adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2010).

Niat Pengusaha UMKM

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan (Ajzen, 2002).

Manusia pada umumnya bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya. Oleh karena itu, niat atau intensi didefinisikan sebagai kecenderungan atau keputusan seseorang dalam hal ini para pengusaha UMKM untuk melakukan suatu tindakan berupa penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Kecenderungan disini adalah kecondongan atau tendensi pribadi seseorang untuk menyajikan atau tidak menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Keputusan adalah keputusan pribadi pengusaha UMKM untuk mematuhi atau tidak mematuhi SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan.

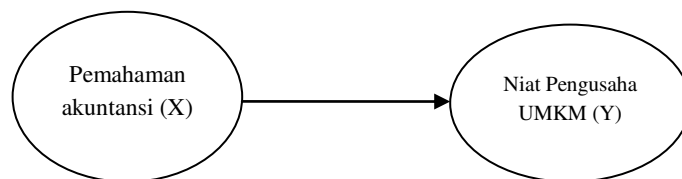
Pengembangan Hipotesis

Para pengusaha UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha pasti berharap usahanya dapat berkembang dan tetap mendapat posisi di pasar ekonomi. Untuk itu mereka akan berusaha menilai seberapa besar pencapaian usahanya. Namun, tidak sedikit yang salah melakukan penilaian karena kesalahan menggunakan data. Keterbatasan pengetahuan akan informasi akuntansi menyebabkan para pengusaha UMKM lebih banyak mendasarkan keputusan-keputusan dalam pengelolaan usaha pada informasi-informasi non akuntansi dan pengamatan sepiantas atas situasi pasar. Bagi mereka informasi akuntansi tidaklah terlalu penting, bahkan mereka merasa terlalu direpotkan dengan penyelenggaraan catatan akuntansi. Bagi mereka yang penting adalah mendapatkan laba tanpa direpotkan dengan penyelenggaraan akuntansi, karena mereka belum merasakan manfaatnya. Hal ini didukung oleh penelitian Pinasti (2001) yang menemukan bahwa para pedagang kecil di pasar tradisional di kabupaten Banyumas tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jati, dkk (2004) menemukan bahwa kebanyakan UMKM masih belum menyelenggarakan pembukuan akuntansi dan pelaporannya dengan baik. Menurut Said (2009) pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menyediakan laporan keuangan yang informatif merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan dalam pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap niat pengusaha UMKM menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP

Adapun kerangka berpikir yang dibangun untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kampung Nasem, Kuler dan Onggaya Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data

survei. Data hasil survei merupakan data *cross section* yang akan dilakukan uji verifikasi untuk menguji hipotesis (*hypotheses testing*).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan variabel pemahaman akuntansi sebagai variabel bebas dan niat pengusaha UMKM sebagai variabel terikat. Pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 5 poin skala *Likert* untuk mengukur seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan yang diajukan.

Pemahaman akuntansi didefinisikan sebagai pemahaman pengusaha UMKM tentang definisi, tujuan, dan proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Untuk mengukur variabel pemahaman akuntansi, responden diminta pendapatnya tentang pertanyaan: (1) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi/pembukuan, (2) laba bersih menggambarkan kinerja kegiatan usaha, (3) pembukuan yang diselenggarakan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya, (4) proses akuntansi dimulai dari jurnal, buku besar hingga penyusunan laporan keuangan, (5) laporan keuangan dipakai oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan (Ernawati dan Wijaya, 2011).

Niat atau intensi adalah kecenderungan atau keputusan pengusaha UMKM untuk melakukan tindakan berupa penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Dalam mengukur variabel niat pengusaha UMKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP, responden akan diminta pendapatnya tentang pertanyaan : (1) kecenderungan untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP, (2) keputusan untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP, dan (3) persepsi pengusaha terhadap pentingnya laporan keuangan sesuai SAK ETAP (Mustikasari, 2007).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pengusaha UMKM di wilayah kampung Nasem, Kuler dan Onggaya yang semuanya berjumlah 37 orang. Karena jumlah populasi yang akan diteliti sedikit, maka semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Jumlah keseluruhan responden yang mengisi dan mengembalikan kuesioner sebanyak 31 responden. Dengan demikian tingkat pengembalian kuesioner (*respon rate*) yang dicapai sebesar 83,8%. Dari 31 kuesioner yang terkumpul terdapat 2 kuesioner (5,4%) yang dieliminasi dari sampel karena tidak lengkap pengisiannya, sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 29 kuesioner (78,4%).

Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan metode survei dengan memberikan kuesioner kepada sampel terpilih. Pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan tertutup (*closed question*), yaitu pertanyaan yang meminta responden untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif jawaban yang diberikan oleh peneliti (Sekaran, 2006).

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana bantuan program SPSS 19. Hasil analisis berupa statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi dan uji hipotesis. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik data. Untuk uji kualitas data dilakukan dengan uji reliabilitas dan uji validitas, sedangkan uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel penelitian memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Statistik deskriptif dalam penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Data selengkapnya mengenai statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Statistik deskriptif variabel penelitian

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
X	2,30	4,20	3,35	0,49
Y	1,33	4,00	2,64	0,67

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 19, data diolah

Berdasarkan Tabel 1 di atas tampak bahwa variabel pemahaman akuntansi (X) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,32 dan standar deviasi 0,49. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab netral untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah pemahaman akuntansi. Nilai minimum variabel pemahaman akuntansi sebesar 2,30 berarti terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan pemahaman akuntansi. Nilai maksimum sebesar 4,20 menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan pemahaman akuntansi.

Variabel niat menyajikan laporan keuangan (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,64 dan standar deviasi 0,67. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab tidak setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah niat menyajikan laporan keuangan. Nilai minimum variabel niat menyajikan laporan keuangan sebesar 1,33 berarti terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan niat menyajikan laporan keuangan. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 4,00 menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan niat menyajikan laporan keuangan.

Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap item-item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi suatu kuesioner dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 (Ghozali, 2009). Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha untuk variabel pemahaman akuntansi (X) sebesar 0,742 dan niat menyajikan LK (Y) sebesar 0,659. Bila menggunakan batasan nilai reliabilitas minimal 0,60, maka seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *cronbach alpha* di atas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum semua variabel sudah cukup reliabel.

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk *degree of freedom* ($df = n - 2$). Hasil uji validitas dengan program SPSS dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Apabila dibandingkan dengan *r* tabel (0,367), seluruh kuesioner memiliki *r* hitung di atas 0,367 dan bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum semua kuesioner sudah cukup valid. Ringkasan hasil perhitungan validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Ringkasan hasil perhitungan validitas dan reliabilitas

Variabel dan Indikatornya	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Corrected Item -Total Correlation</i>	Keterangan
Pemahaman Akuntansi (X)	0,742		Reliabel
X1		0,483	Valid
X2		0,654	Valid
X3		0,488	Valid
X4		0,389	Valid
X5		0,527	Valid

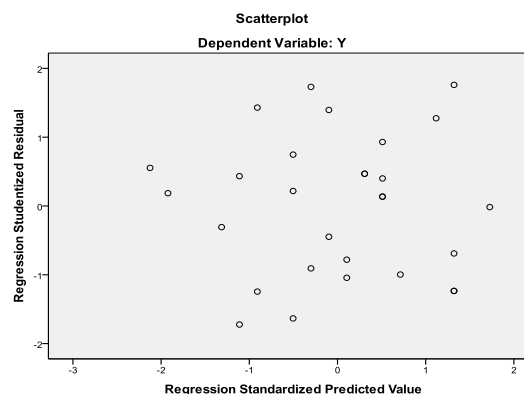
Variabel dan Indikatornya	Cronbach Alpha	Corrected Item -Total Correlation	Keterangan
Niat (Y)	0,659		Reliabel
Y1		0,539	Valid
Y2		0,420	Valid
Y3		0,476	Valid

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 19, data diolah

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Apabila nilai Kolmogorov-Smirnov (Z) di bawah 1,97 dan memiliki probabilitas signifikansi lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan (0,05) berarti data residual berdistribusi normal, dan sebaliknya. Hasil uji K-S memberikan nilai Kolmogorov-Smirnov (Z) sebesar 0,568 jauh di bawah 1,97 dengan probabilitas signifikansi 0,903 (di atas $\alpha = 0,05$). Dapat disimpulkan data residual pada model regresi berdistribusi normal.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika pada grafik scatterplot ada pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Grafik Scatterplot model regresi

Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini tampak pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil pengujian hipotesis

Hipotesis	Konstanta	Koefisien	t-hitung	Sig t	Keterangan
H1: $X_1 \rightarrow Y$	5,529	0,262	1,768	0,088	Tidak signifikan

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 19, data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 3 di atas, maka model regresi dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + \varepsilon$$

$$Y = 5,529 + 0,262X + \varepsilon$$

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap niat pengusaha UMKM menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung yang lebih kecil daripada t-tabel ($1,768 < 2,045$) pada tingkat signifikansi 5% (pengujian dua sisi). Atau dapat dilihat pada nilai signifikan-t yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 ($0,088 > 0,05$).

Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap niat pengusaha UMKM menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP kemungkinan dikarenakan para pengusaha skala menengah ke bawah lebih fokus pada upaya meningkatkan dan mempertahankan kelangsungan usaha yang dijalankan. Menyusun strategi pemasaran yang dapat meningkatkan pemasukan lebih penting dibandingkan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Sistem pembukuan sederhana yang mudah dipahami sudah dianggap cukup untuk mendapat gambaran kondisi usaha yang dijalankan. Manfaat langsung menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi belum terlalu dirasakan oleh para pengusaha menengah ke bawah, sehingga mereka menganggap bahwa laporan keuangan tidak terlalu penting. Selain itu menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi belum menjadi budaya bagi kebanyakan pengusaha kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2011) bahwa implementasi SAK ETAP tidak berpengaruh terhadap kemauan pengusaha menyajikan LK yang berkualitas. Persepsi

pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan tersebut muncul dari semakin besarnya kebutuhan memiliki suatu laporan keuangan untuk berbagai tujuan seperti persyaratan pengajuan kredit, evaluasi usaha, dan sebagai sumber informasi untuk ekspansi usaha (Rudiantoro dan Siregar, 2011).

Dilihat dari koefisien determinasi, model regresi di atas memiliki *adjusted R square* sebesar 0,104. Angka ini menunjukkan bahwa variasi variabel terikat (niat menyajikan laporan keuangan) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (pemahaman akuntansi) hanya sebesar 10,4%, sisanya 89,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Artinya masih ada variabel lain di luar model penelitian yang bisa memengaruhi niat pengusaha menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap niat pengusaha UMKM menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Responden UMKM dalam penelitian ini memiliki persepsi bahwa pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai SAK ETAP akan menjadi sesuatu yang cukup penting dalam kegiatan usaha ketika kebutuhan memiliki laporan keuangan untuk berbagai tujuan semakin besar, dan ketika skala usaha yang dikelola sudah semakin besar dengan transaksi keuangan yang semakin banyak dan kompleks.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mengganggu hasil penelitian, yaitu populasi dan sampel dalam penelitian ini hanya pengusaha UMKM yang berdomisili di Kampung Nasem, Kuler, dan Onggaya dengan skala usaha mikro, sehingga perlu kehati-hatian dalam menggeneralisir hasil temuan. Hasil penelitian mungkin akan berbeda jika penelitian dilakukan untuk cakupan wilayah yang lebih luas dan skala usaha yang bervariasi. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner, sehingga dapat bersifat subjektif dan cara berpikir responden dalam menjawab item pertanyaan tidak dapat dianalisa. Hal ini dapat menimbulkan bias terhadap hasil penelitian apabila persepsi responden berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian dengan skala usaha yang bervariasi, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk wilayah Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi niat pengusaha UMKM menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP, seperti : ukuran usaha, sosialisasi SAK ETAP, kebiasaan menyusun laporan keuangan, dan persepsi tentang pentingnya laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2002. Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. September (Revised January, 2006).
- Baas, T dan Mechthild, S. 2006. Relationship Banking and SMEs : A Theoretical Analysis. *Small Business Economic* Vol 27.
- Ernawati, S dan Wijaya, M. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Di Bidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Jurnal Spred*. Vol. 1 No. 1, April.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jati, H., Bala, B., dan Otnil, N. 2004. Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Usahawan*, II No. 8, 210 – 218.
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. BPFE Yogyakarta.
- Murniati. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengusaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah. *Universitas Diponegoro*, Semarang
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Pinasti, M. 2001. Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Usaha Para Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, No 1 Vol 3.
- Rudiatoro, R dan Siregar, S. V. 2011. Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 2, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Suwardjono. 2006, *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Zimele, A. 2009. The SMME Business Toolkit. New York: SBDA (Pty) Ltd.
www.depkop.go.id

mempunyai radio dan juga keinginan masyarakat untuk membeli Koran rendah sehingga media tersebut juga dinilai belum efektif untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.

Implementasi Perda No. 12 Thn 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan perangkat hukum yang mengatur tentang hal – hal yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan dilingkungan pemerintah Kabupaten Alor. Berikut ini beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Alor yang dipandang penting dalam Implementasi antara lain :

Persyaratan dan Cara Memperoleh Izin

Izin harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan suatu kegiatan, begitu juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor No 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bahwa orang pribadi atau badan yang akan mendirikan suatu bangunan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati. Kegiatan mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebahagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratkan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan bangunan.

Sebelum mendapatkan izin dari Pemerintah, maka pihak yang akan mendirikan bangunan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, adapun persyaratan-persyaratan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana termuat dalam pasal 77 ayat 2 Peraturan Daerah No 12 Tahun 1998 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di pemerintah Kabupaten Alor: 1) formulir permohonan IMB diisi dengan Lengkap; 2) foto copy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah yang dikeluarkan oleh BPN; 3) Foto copy KTP; 4) Foto copy bukti pembayaran PBB; 5) Arahan Perencanaan (Advis Planning); 6) Gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh pemegang SIBP dan telah diasistensi; 7) Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah miliknya; 8) Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan 9) Rekomendasi dan instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan; 10) Dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 16 responden yang pernah mengetahui informasi melalui sosialisasi berusaha untuk mengurus IMB, namun ada kendala persyaratan gambar kontruksi bangunan, karena untuk mengurus persyaratan itu saja sudah mengeluarkan dana yang cukup banyak (Wawancara Tanggal 8 September 2013)

Wawancara selanjutnya dilakukan terhadap informen dalam hal ini kepala Perijinan, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa diantara persyaratan diatas yang sulit dan paling sering tidak dilengkapi oleh para pemohon adalah tidak melengkapi gambar kontruksi bangunan dan pemohon juga tidak dapat memberikan denah jalan sedangkan dalam ketentuan teknis membangun harus disertai dengan denah jalan. (*hasil wawancara dengan kepala perizinan, 18 September 2013*)”

Dengan demikian dari persyaratan diatas dapat diperoleh informasi bahwa pemilik bangunan tidak dapat memiliki Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan kabupaten Alor yang terdapat dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Tetapi pemilik bangunan yang memiliki izin tidak memiliki kesulitan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan karena melengkapi persyaratan yang ada.

Jangka Waktu Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan

Jangka waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan adalah selambat – lambatnya satu bulan atau 30 hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang peneliti lakukan diperoleh informasi bahwa untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan membutuhkan waktu yang cukup lama yakni bisa mencapai 30 hari kerja atau lebih, selain waktu pengurusan yang lama retribusinya pun mahal. (hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak memiliki IMB tanggal 18 September 2013)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa *Perda No 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maksimal pengurusan IMB satu bulan atau 30 hari dengan catatan persyaratan administrasi sudah dilengkapi pemohon. (hasil wawancara dengan kepala bagian perizinan, 18 September 2013).*

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa untuk waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah selambat-lambatnya 30 hari kerja, akan tetapi apabila ada persyaratan yang belum dilengkapi oleh masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, maka pengurusannya bisa membutuhkan waktu yang lebih lama.

Biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Biaya retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Alor. Besar pungutan retribusi tergantung dari harga atau nilai bangunan. Secara garis besar pungutan kurang lebih 2 % dari nilai bangunan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan yaitu menurut masyarakat yang belum memiliki IMB menyatakan bahwa mengurus IMB itu memiliki jangka waktu pembuatannya, jika dalam tempo waktu yang diberikan kegiatan membangun belum juga selesai, maka kami harus mengeluarkan uang lagi untuk membuat SK IMB baru, sementara kami membangun rumah secara bertahap, karena kami tidak mempunyai dana yang cukup alias kekurangan biaya untuk menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan . Sementara untuk membuat SK baru kami harus mengeluarkan sejumlah biaya lagi. (hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak memiliki IM tanggal 18 September 2013)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni kepala perijinan diperoleh informasi bahwa untuk biaya pembuatan SK IMB ini adalah 2% dari nilai bangunan, itu sudah ketentuan dari pemerintah, jadi semakin tinggi nilai bangunan itu maka semakin tinggi juga biayanya. (hasil wawancara dengan kepala bagian perizinan, 18 September 2013)”

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa untuk biaya retribusi IMB, besar pungutan retribusi tergantung dari harga atau nilai bangunan. Secara garis besar pungutan kurang lebih 2% dari nilai bangunan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan hal persyaratan maupun cara memperoleh IMB seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah diatas, pada dasarnya ketentuan yang diberikan sudah sangat jelas, namun kesulitan mengurus IMB terjadi karena terkendala oleh gambar kontruksi bangunan atau pemohon tidak dapat menyediakan jalan. Untuk waktu pengurusan IMB adalah selama 30 hari kerja, namun apabila ada persyaratan yang dipersyaratkan belum lengkap, maka pengurusan IMB ini bisa memakan waktu lebih dari jangka waktu yang ditentukan sampai persyaratan tersebut dilengkapi. Adapun besaran pungutan retribusi tergantung dari harga atau nilai bangunan yang mau dibangun oleh masyarakat.

Sanksi

Kenyataan yang terjadi dilapangan adalah jauh berbeda dengan aturan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Alor. Sanksi hukum yang dikenakan bagi mereka yang mendirikan bangunan tanpa adanya izin yang ada dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Alor jauh berbeda, karena pemberian sanksi terhadap pelanggaran ini tidak pernah dilakukan.

“Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa kami sebagai masyarakat belum pernah menerima teguran ataupun peringatan dari Satpol PP atau Dinas

terkait lainnya, dan kami pun belum pernah menerima sanksi apapun. (hasil wawancara dengan pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB tanggal 18 September 2013)”

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa sejauh ini masyarakat belum pernah menerima peringatan atau teguran dan sanksi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Alor kepada pemilik bangunan yang belum memiliki IMB

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Alor

Komunikasi

Suatu informasi dan arahan yang diterima dapat dilaksanakan jika informasi dan arahan pelaksana jelas maksud dan tujuannya. Kejelasan yang dimaksud adalah terdapatnya kekhususan mengenai apa yang akan dicapai dan menetapkan metode apa yang sesuai untuk digunakan dalam mencapai target dan tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang kejelasan informasi mengenai persyaratan mendirikan bangunan menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan kepada kami tentang isi perda 12 tahun 1998 kurang jelas sehingga kami tidak begitu paham, karena penyampaiannya juga di saat kami datang di bagian perijinan, waktu penyampaiannya juga terburu - buru, tidak ada waktu untuk kami bertanya sehingga kami tidak begitu mengerti apalagi kami ada yang hanya sekolah SD

Hasil wawancara selanjutnya kami lakukan terhadap bagian perijinan bahwa memang benar staf kami menyampaikan informasi/ sosialisasi kepada masyarakat yang datang di bagian perijinan, akan tetapi belum dipahami oleh masyarakat dikarenakan SDM masyarakat masih kurang sehingga mereka tidak cepat mengerti apa yang diampaikan (wawancara dilakukan pada tanggal 18 September 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diperoleh informasi bahwa dipihak masyarakat mereka belum begitu memahami isi perda karena penyampaiannya terburu – buru pada saat pelayanan di kantor dan waktu penyampaian juga terlalu singkat sehingga mereka tidak pahan. Pengakuan ini dibenarkan oleh kepala bagian perijinan bahwa penyampaian informasi tentang isi perda memang belum maksimal, akan tetapi factor lain juga yang menjadi penyebab adalah rendahnya SDM masyarakat yang juga menjadi kendala diserapnya informasi secara baik

Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumberdaya

yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Implementasi memerlukan sumberdaya yang memadai, sebab bagaimanapun baiknya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan, tanpa adanya dukungan sumberdaya inplementasi akan mengalami hambatan bahkan mungkin mengalami suatu kegagalan.

Sesuai dengan SK Dinas Tata Ruang dan Bangunan kabupaten Alor bahwa staf yang bertugas mengurus izin mendirikan bangunan ada 12 orang pegawai.

”Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa jumlah staf yang kami miliki tidak sebanding dengan pekerjaan yang sangat banyak menyulitkan kami untuk bekerja dan kami hanya memiliki 12 orang staf pegawai. Untuk itu kami berusaha untuk menambah pegawai yang ahli dalam bidang izin bangunan ini. (hasil wawancara dengan kepala bagian perizinan, 18 September 2013)”

Dari hasil wawancara diketahui bahwa masih kurangnya staf pegawai dibidang perizinan sedangkan wilayah kerjanya sangat luas. Selain itu staf pegawai mengharapkan penambahan pegawai supaya kedepannya waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Alor

1. Sanksi hukum yang kurang tegas
2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan masih kurang
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana
4. Kurangnya kesadaran Masyarakat

KESIMPULAN

- a. Media yang digunakan untuk sosialisasi perda 12 Tahun 1998 masih minim sehingga informasi perda belum diketahui oleh masyarakat secara maksimal
- b. Sumber daya manusia untuk sosialisasi masih minim sehingga banyak potensi Pendapatan Asli daerah yang belum dikelola secara maksimal
- c. Ketersediaan dana untuk sosialisasi perda 12 Tahun 1998 masih belum maksimal sehingga banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh petugas untuk memberikan sosialisasi
- d. Aparat penegak hukum belum mampu melaksanakan sanksi hukum bagi masyarakat yang melanggar perda Nomor 12 Tahun 1998

-
- e. Jumlah staf yang mengurus IMB pada bagian pengurus IMB di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Alor masih kurang sehingga pelayanan kepada masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama
 - f. Keterbatasan personil untuk mendata bangunan di setiap wilayah kecamatan sehingga banyak rumah / bangunan yang belum memiliki IMB tidak terdata secara baik, sehingga potensi PAD masih belum dikelola secara maksimal
 - g. Kekurangan tenaga ahli dalam pengurusan IMB, sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk membantu masyarakat dalam hal gambar / sket bangunan yang sebagai salah satu syarat pengurusan IMB
 - h. Fasilitas menunjang kunjungan lapangan seperti kendaraan dinas belum mencukupi untuk menjangkau semua daerah

S A R A N

- a. Disarankan agar pemerintah memperbanyak media sosialisasi perda nomor 12 Tahun 1998 sehingga masyarakat bisa mengetahui persyaratan IMB
- b. Disarankan agar pemerintah dapat menambah / memperbanyak SDM untuk kepentingan sosialisasi agar potensi PAD kabupaten SBD dapat dikelola maksimal sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah SBD
- c. Disarankan agar pemerintah mengalokasikan dana dalam APBD untuk sosialisasi perda nomor 12 Tahun 1998
- d. Disarankan pemerintah dapat membekali aparat penegak hukum agar memberikan sanksi hukum bagi masyarakat yang melanggar ketentuan perda nomor 12 Tahun 1998
- e. Disarankan agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah staf yang mengurus IMB sehingga tidak terjadi keterlambatan pengurusan
- f. Disarankan agar pemerintah dapat meningkatkan personil untuk mendata bangunan di setiap wilayah yang belum memiliki IMB untuk selanjutnya dilakukan pengurusan IMB
- g. Disarankan agar pemerintah Sumba Barat Daya dapat merekrut tenaga ahli dalam pengurusan IMB sehingga proses pengurusan bias cepat dan kesalahan dapat diminimalisir
- h. Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor agar dapat mengadakan Fasilitas menunjang kunjungan lapangan seperti kendaraan dinas yang belum mencukupi untuk menjangkau semua daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Belanja Negara (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kota Bogor), Universitas Indonesia
- Burgin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Wali Pers. Surabaya
- Devas, Nick et. al. 1989. (Peny.). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI-Press, Jakarta
- Gibson, James L, dkk, 1987. Organisasi dan Manajemen : Perilaku Struktur, Proses, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Halim, Abdul (2004), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1983. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung
- Hanurawan dan Muhammad. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bina Aksara
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Marnis. 2009. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru. PT Panca Abdi Nugraha
- Muhammadreza, 14 September 2008. Kenali IMB Hindari Masalah. Press released Multiply
- Kaho, Josef, Riwo, 2003. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik* : Bandung. Alfabeta
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 1998. Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Pemerintah RI, Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.